

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya Akuntansi Sektor Publik di Indonesia maka hal yang paling utama dilakukan oleh pemerintahan, yaitu mewujudkan pertanggungjawaban terhadap masyarakat (Soimah, 2004). Pemerintah dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik, seharusnya menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No 22 dan No 25 Tahun 1999 dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia telah melaksanakan otonomi daerah, yaitu sejak tahun 2000. Daerah otonom sendiri meliputi provinsi, kabupaten maupun kota dimana pemerintahannya adalah pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan kota. Pemerintahan tersebut tidak terlepas dari adanya aspek keuangan yang mana dikelola oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disajikan secara transparan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah (Andini dan Yusrawati 2015).

Dalam meningkatkan kualitas pemerintah daerah, tuntutan masyarakat bisa dijadikan sebagai acuan agar bisa menjadi pemerintah yang lebih baik (*good governance*) sehingga pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihak yang

memakai laporan keuangan tersebut tentunya mengakses laporan keuangan yang telah disediakan pemerintah daerah maka dari itu informasi yang ada di dalamnya harus benar-benar bermanfaat untuk para penggunanya (Putra, 2018).

Apabila laporan keuangan tidak disajikan dengan apa yang sebenarnya terjadi maka laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi yang salah sehingga penyajian laporan keuangan tersebut dapat merugikan penggunanya.

Dalam surat Al Hujurat ayat 6 dijelaskan sebagai berikut

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَنُصِبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman ! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik, dan hendaklah bersifat hati-hati dalam menerimanya dan jangan menerimanya begitu saja. Kaitannya dengan penelitian ini adalah dalam menyajikan informasi akuntansi agar disajikan dengan baik sesuai standar yang benar sehingga dapat menyediakan informasi yang tidak menyesatkan dan bermanfaat bagi pemakai.

Laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah saat ini sudah terbilang cukup berkualitas dan bisa dikatakan baik. Hal ini bisa dilihat dari opini audit yang diberikan BPK pada pemerintah daerah, tak sedikit pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara

berturut-turut artinya, pemerintah daerah sudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar pelaporan keuangan. Perolehan predikat WTP tidaklah bisa menjadi tujuan akhir pada penyusunan laporan keuangan. Dengan perolehan predikat tersebut, pemerintah harusnya melakukan evaluasi kembali terhadap hal-hal apa saja yang bisa dimaksimalkan terutama dalam hal efisiensi anggaran.

Menurut data yang ditunjukkan pada *Annual Report* BPK perwakilan Jawa Tengah tahun 2015-2017 masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang memperoleh opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Data perolehan opini audit BPK untuk Pemerintah Daerah di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Opini Audit BPK Perwakilan Jawa Tengah 2015-2017

No	Opini BPK	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	21	31	32
2	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)	-	-	-
3	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	15	5	4
4	Tidak Wajar (TW)	-	-	-

Sumber : Annual Report BPK perwakilan Jawa Tengah tahun 2015-2017

Dalam opini audit pada masing-masing pemerintah daerah yang ada di provinsi Jawa Tengah dapat dilihat bahwa Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan semakin tahun semakin meningkat. Walaupun secara keseluruhan telah mengalami peningkatan, tetapi pada tahun

2017 masih ada pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), salah satunya adalah Kabupaten Klaten yang masih memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP), artinya belum semua laporan keuangan pemerintah daerah diakui WTP oleh BPK atau belum sepenuhnya berkualitas. Terbukti dengan laporan keuangan pemerintah daerah masih ada yang belum sesuai dengan standar-standar yang seharusnya ditetapkan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemeriksaan audit BPK tidak hanya terbatas pada pemeriksaan laporan keuangan saja tetapi juga dinilai kesesuaiannya pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diterapkan pada masing-masing pemerintah daerah. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern menjadi prioritas utama bagi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPK maupun lembaga-lembaga lainnya (Agustiawan dan Rasmini, 2016). Sistem pengendalian intern berisi seluruh proses, sistem, dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, sistem pengendalian intern memiliki peran didalamnya dimana sistem pengendalian intern ini sebagai pengendali dan pengawas penyusunan laporan keuangan agar dapat dilaporkan dan disusun dengan benar, tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan standar agar memperoleh opini audit yang baik, dengan demikian bahwa sistem pengendalian internal diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2016) serta Munasyir (2015) namun terdapat

penelitian yang dilakukan oleh Budiawan dan Purnomo (2014) dan Desipradani dan Nuraini (2018) menemukan hubungan negatif antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan

Selain Sistem Pengendalian Intern (SPI), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) juga berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini, penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD baik menggunakan sistem atau dilakukan secara manual (Permendagri No 59 Tahun 2007) yang diharapkan dapat mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas.

Jika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan dengan baik, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Karena pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan akan sulit memenuhi karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian Mahaputra dan Putra (2014) serta Andini dan Yusrawati (2015) namun terdapat penelitian yang dilakukan oleh Kartopawiro dan Susanto (2018) yang menyatakan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Indriasari (2008), kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki individu berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada individu tersebut. Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu ditingkatkannya SDM yang faham akan akuntansi pemerintah dan operasional tentang pemerintahan. Menurut Andini dan Yusrawati (2015), kurangnya pegawai yang berlatar pendidikan akuntansi menjadikan pemahaman aparatur Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kurang dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Kompetensi sumber daya manusia dapat memengaruhi terhadap baik buruknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sumber daya yang dimaksudkan adalah yang mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar dan yang memahami jalannya akuntansi pemerintahan, baik dalam hal keuangan daerah maupun operasional pemerintahan. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang memahami standar penyusunan laporan keuangan pemerintah menjadikan laporan keuangan tersebut belum dapat dikatakan berkualitas. Beberapa riset yang dilakukan oleh Agustiawan dan Rasmini (2016) serta Andini dan Yusrawati (2015) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah namun terdapat penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dkk (2015) yang menyatakan hubungan negatif antara sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peneliti menduga sumber daya manusia dapat memoderasi sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Alasan dugaan karena apabila sumberdaya manusia memiliki kompetensi yang baik maka dalam memahami dan menerapkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern juga baik yang tentunya hal ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari kompetensi yang dimiliki namun juga dapat dinilai dari tingkat tanggung jawab yang dimiliki oleh sumber daya tersebut.

Motivasi dilakukannya penelitian ini karena masih ada pemerintah daerah yang memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) salah satunya yaitu Kabupaten Klaten. Motivasi peneliti menambahkan variabel moderasi pada penelitian ini karena terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian-penelitian terdahulu. Adapun yang menjadi variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia karena semakin baik kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia diharapkan penerapannya juga baik sehingga sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan akan semakin kuat.

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kabupaten Klaten)". Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari (Karsana & Suaryana, 2017). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengganti variabel Standar Akuntansi Pemerintah dengan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan dalam penelitian ini menggunakan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel pemoderasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap hubungan antara SAKD dengan kualitas laporan keuangan SKPD?
4. Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap hubungan antara penerapan SPI dengan kualitas laporan keuangan SKPD?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Menguji dan memperoleh bukti empiris apakah kompetensi SDM memoderasi pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Menguji dan memperoleh bukti empiris apakah kompetensi SDM memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti terdapat manfaat yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan dalam mengembangkan pemanfaatan sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat bagi akademik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi bagi riset terkait dengan topik dan dapat membantu untuk mengkonfirmasi teori stewardship, teori agency, dan teori kompetensi spencer dalam penelitian selanjutnya.